



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI BALI 2019

<https://bali.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**



**INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
PROVINSI BALI
2019**

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI BALI 2019

ISBN : 978-602-1393-63-5

No Publikasi : 51540.2006

Katalog : 7102025.51

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm.

Jumlah Halaman : xiv + 46 halaman.

Naskah : Bidang Statistik Distribusi.

Penyunting : Bidang Statistik Distribusi.

Cover : Bidang Statistik Distribusi.

Gambar cover : Designed by Freepik.

Diterbitkan oleh : ©BPS Provinsi Bali.

Dicetak Oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Indeks Kemahalan Konstruksi
Provinsi Bali 2019

Penanggung Jawab Umum:

Ir. Adi Nugroho, M.M.

Penanggung Jawab Teknis:

I Gede Nyoman Subadri, SE.

Koordinator:

Ni Made Inna Dariwardani, MA., ME.

Anggota:

Dyah Ayu Setyaningrum, SST

Layout:

Dyah Ayu Setyaningrum, SST

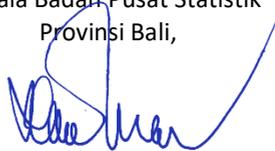
KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2019 merupakan hasil dari pelaksanaan Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) yang dilakukan secara triwulanan di Provinsi Bali selama tahun 2019. Data yang dikumpulkan dalam survei tersebut mencakup harga berbagai barang dan jasa konstruksi.

Data yang disajikan dalam publikasi ini meliputi data IKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Dengan terbitnya publikasi ini diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan data IKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2015-2019 dan merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini, terutama kepada perusahaan atau responden yang telah membantu kelancaran Survei Harga Kemahalan Konstruksi sehingga publikasi ini bisa diterbitkan. Semoga publikasi ini bermanfaat dan dapat memenuhi sebagian harapan pengguna data. Berbagai saran dan masukan sangat kami harapkan demi edisi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Denpasar, Oktober 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Bali,



Ir. Adi Nugroho, M.M.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Bab I:	
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Cakupan.....	5
1.4 Konsep dan Definisi	5
Bab II:	
Metodologi.....	9
2.1 Indeks Kemahalan Konstruksi	11
2.2 Paket Komoditas IKK	13
2.3 Diagram Timbang IKK.....	16
2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)	16
Bab III:	
Ulasan Ringkas.....	19
3.1 Gambaran Umum Provinsi Bali	21
3.2 Dana Alokasi Umum Provinsi Bali.....	26
3.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali.....	27
3.4 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota	30
Lampiran	xiii

Daftar Tabel

Tabel 3.1. Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Status di Bali, Keadaan Akhir Tahun 2019 (km)	25
Tabel 3.2. Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Jalan di Bali, Keadaan Akhir Tahun 2019 (km).....	25
Tabel 3.3. Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Bali, 2019	27
Tabel 3.4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2019	31

Daftar Gambar

Gambar 3.1. Persentase Luas Wilayah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2019.....	22
Gambar 3.2. Ketinggian Ibu Kota Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2019	23
Gambar 3.3. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2019.....	28
Gambar 3.4. Nilai dan Ranking Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali, 2015-2019	29
Gambar 3.5. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2019.....	32
Gambar 3.6. Indeks Kemahalan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2019.....	33

Lampiran

Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2015 (Kota Surabaya = 100).....	37
Tabel 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2016 (Kota Surabaya = 100).....	38
Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2017 (Kota Surabaya = 100).....	39
Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2018 (Kota Semarang = 100)	40
Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2019 (Kota Semarang = 100)	41
Tabel 6. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2015 Provinsi Bali (Kota Surabaya = 100).	42
Tabel 7. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2016 Provinsi Bali (Kota Surabaya = 100).	43
Tabel 8. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2017 Provinsi Bali (Kota Surabaya = 100).	44
Tabel 9. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2018 Provinsi Bali (Kota Semarang = 100).	45
Tabel 10. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2019 Provinsi Bali (Kota Semarang = 100).	46



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diduga membawa perubahan tersendiri terhadap pola penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan landasan tersebut, Pemerintah daerah dapat mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Desentralisasi fiskal memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan publik. Namun, disadari bahwa masing-masing daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama sehingga menimbulkan potensi ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya dan untuk mengatasinya pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu dana perimbangan yang dibagikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di masing-masing daerah. Terkait dengan hal tersebut, salah satu variabel yang digunakan dalam formulasi penghitungan DAU adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) disamping variabel jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab sebagai penyedia data statistik dasar di Indonesia melakukan penghitungan IKK sejak tahun 2002 untuk keperluan penghitungan DAU 2003 yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang. Data IKK tersebut ditujukan untuk melihat tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antar wilayah dibandingkan dengan harga barang/jasa konstruksi suatu kota acuan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 16.056 pulau (sesuai hasil forum *United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN)* dan *United Nations Group of Experts on*

Geographical Names (UNGEGN) yang berlangsung pada 7-18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat), variasi infrastruktur baik di setiap pulau atau wilayah patut diduga memegang peranan dalam penentuan harga konstruksi. Semakin sulit letak geografis suatu daerah dapat diduga semakin tinggi pula tingkat harga konstruksi di daerah tersebut.

1.2 Tujuan

Penyajian Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali 2019 dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait data tingkat kemahalan konstruksi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi Provinsi Bali dengan provinsi lainnya.

1.3 Cakupan

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pengolahan dan penghitungan hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi yang dilakukan secara triwulanan dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019.

1.4 Konsep dan Definisi

1.4.1 Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) didefinisikan sebagai suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga

barang/jasa konstruksi antar wilayah dibandingkan dengan harga barang/jasa konstruksi suatu kota acuan.

1.4.2 Bahan bangunan atau konstruksi

Bahan bangunan atau konstruksi didefinisikan sebagai material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan atau konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.

1.4.3 Kegiatan Konstruksi

Kegiatan Konstruksi didefinisikan sebagai suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dicatat dalam penghitungan IKK hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan konstruksi antara lain: gedung, jalan, jembatan, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, serta distribusi dan bangunan jaringan komunikasi.

1.4.4 Sewa Alat Berat

Harga sewa alat berat konstruksi didefinisikan sebagai harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini

merupakan sewa selama 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek, dan juga tidak termasuk biaya jasa operator. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki syarat batas umur maksimal 8 tahun.

<https://bali.bps.go.id>



BAB II METODOLOGI

BAB II

METODOLOGI

2.1 Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan harga bahan bangunan dan jasa konstruksi antar lokasi yang berbeda pada periode yang sama dibandingkan dengan suatu kota acuan. Lebih lanjut, IKK dapat dikatakan sebagai cerminan dari suatu nilai bangunan atau konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi dibandingkan dengan nilai bangunan atau konstruksi yang sama di suatu kota acuan.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan harga input dan yang kedua dengan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan, digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Disisi lain, pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Namun, terdapat kelemahan pada pendekatan ini yaitu dalam

harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga kurang sesuai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. Dengan pertimbangan ini, disepakati penghitungan IKK menggunakan pendekatan harga input.

Dalam penghitungan IKK diperlukan data/komponen penunjang yaitu paket komoditas, diagram timbang, dan data harga jenis bahan bangunan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK. Selain itu, ditetapkan pula suatu kabupaten/kota sebagai acuan dalam penghitungan indeksnya. Penentuan kota acuan pada penghitungan IKK dilakukan dengan menentukan salah satu kabupaten/kota yang memiliki nilai IKK mendekati angka rata-rata seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK diduga untuk memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK-nya. Pada tahun 2013 sampai 2014 digunakan Kota Samarinda sebagai kota acuan. Tahun 2015 hingga 2017 digunakan Kota Surabaya sebagai kota acuan, sedangkan tahun 2018 sampai dengan 2019 digunakan Kota Semarang sebagai kota acuan.

2.2 Paket Komoditas IKK

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components (BOCC)*. Pendekatan ini digunakan dalam *International Comparison Programs (ICP)* tahun 2005. Metode pendekatan ini didesain untuk keterbandingan antar wilayah. Dalam metode *BOCC*, data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah. Komponen konstruksi merupakan output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini yaitu semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan dengan tujuan memberikan perbandingan harga konstruksi antar wilayah yang lebih sederhana dan biaya yang murah serta memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity (BOQ)*. Mengacu pada pendekatan *BOCC*, paket komoditas IKK didefinisikan sebagai suatu keranjang atau paket yang terdiri dari sejumlah bahan bangunan atau konstruksi yang dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan atau konstruksi.

IKK dihitung menurut jenis kelompok barang/komoditas yang terdiri dari 5 (lima) jenis kelompok bangunan yaitu kelompok bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; prasarana pekerjaan umum untuk pertanian; jalan, jembatan, dan pelabuhan; bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi;

serta bangunan lainnya. Pengelompokan jenis bangunan yang dimaksud mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Adapun klasifikasi dari masing masing jenis bangunan tersebut sebagai berikut :

- a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal:
 1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas.
 2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.
- b. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian:
 1. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 2. Bangunan proses tempat hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
- c. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan:
 1. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu rambu lalu lintas.

2. Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan kereta.
 3. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
- d. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi:
1. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.
 2. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 3. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telefon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/ penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
 4. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
 5. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
 6. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.

7. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
8. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
9. Bangunan lainya, meliputi: bangunan sipil, pembangunan lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman.

2.3 Diagram Timbang IKK

Diagram timbangan yang digunakan dalam penghitungan IKK tahun 2019 terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang IKK umum. IKK tahun 2019 menggunakan penimbang *updating Bill of Quantity (BoQ)* sampai tahun 2018. *BoQ* ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen

belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU salah satunya sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi.
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Persentase Pembagian DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebesar 10 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Perhitungan besaran DAU secara nasional yaitu minimal sebesar 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto). Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya, tergantung dari hasil hitungan komponen-komponen pembentuk DAU seperti variabel jumlah penduduk, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita. Bahkan di beberapa daerah yang memiliki Kapasitas Fiskal sangat besar dimungkinkan untuk tidak mendapat DAU ($DAU = 0$).



BAB III

ULASAN RINGKAS

BAB III

ULASAN RINGKAS

3.1 Gambaran Umum Provinsi Bali

3.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Bali tercatat sebagai salah satu provinsi kepulauan dengan luas terkecil dari 34 provinsi di Indonesia yaitu hanya 5.636,66 km² dan berada di antara provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, Provinsi Bali terletak di antara Samudera Indonesia dan Laut Bali masing - masing di bagian selatan dan utara serta Selat Bali dan Selat Lombok di bagian barat dan timurnya

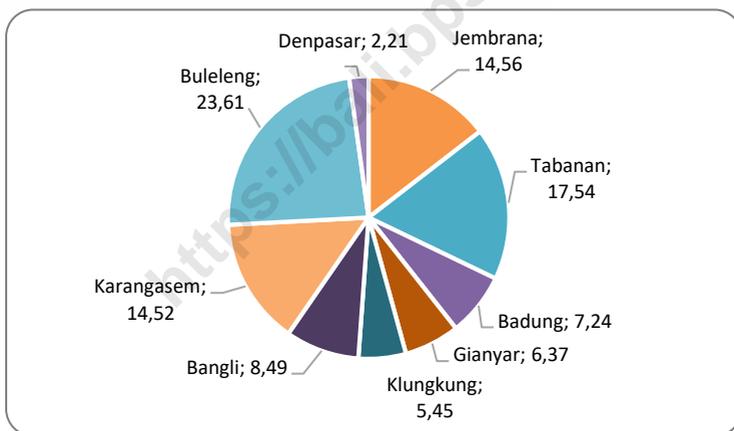
Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" – 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" – 115°42'40" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Indonesia. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Bali sebagai berikut :

- Batas utara dengan Laut Bali.
- Batas selatan dengan Samudera Hindia.
- Batas barat dengan Selat Bali.
- Batas timur dengan Selat Lombok.

Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar.

Di antara ke sembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng tercatat memiliki luas wilayah terluas yaitu 1.364,73 km² (23,61%) dari luas provinsi Bali, diikuti oleh Tabanan 1.013,88 km² (17,54%), Jembrana 841,80 km² (14,56%), Karangasem 839,54 km² (14,52%), Bangli 490,71 km² (8,49%), Badung 418,62 km² (7,24%), Gianyar 368,00 km² (6,37%), Klungkung 315,00 km² (5,45%), dan Kota Denpasar 127,78 km² (2,21%) merupakan wilayah tersempit.

Gambar 3.1. Persentase Luas Wilayah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2019

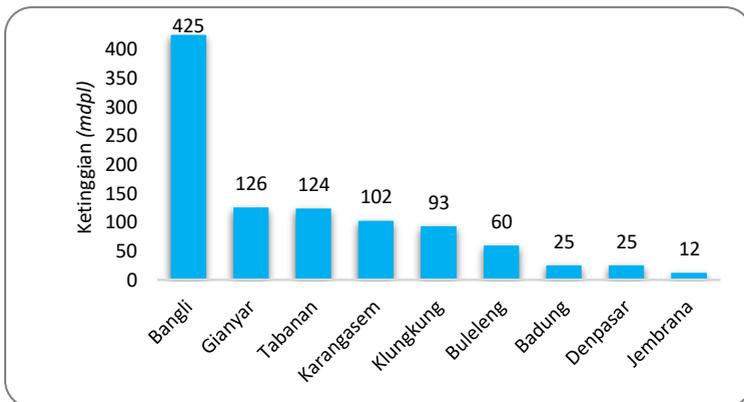


Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi, yakni Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Bali tercatat setinggi 3.142 meter. Sedangkan gunung yang tidak berapi antara lain Gunung Merbuk (1.356 meter) di Jembrana,

Gunung Patas (1.414 meter) di Buleleng, dan Gunung Seraya (1.058 meter) di Karangasem serta beberapa gunung lainnya.

Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yakni Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai serta Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0-2%) tercatat seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha. Ibukota Kabupaten Bangli merupakan ibu kota yang memiliki ketinggian paling tinggi yaitu setinggi 425 meter dari permukaan laut. Sedangkan ibukota Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten dengan ketinggian paling rendah yaitu 12 meter dari permukaan laut. Selengkapnya tentang ketinggian Ibukota Kabupaten/Kota disajikan pada gambar 3.2.

Gambar 3.2. Ketinggian Ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2019



3.1.1 Kondisi Transportasi

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan diperlukan demi memudahkan proses mobilisasi penduduk antar daerah dan menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, utamanya untuk daerah-daerah sulit terjangkau. Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat yaitu sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Terkait dengan besaran harga barang dan jasa pada bidang konstruksi, selain ketersediaan barang/jasa (*supply*), kelancaran distribusi barang/jasa (konstruksi) ke suatu wilayah diduga memiliki pengaruh. Dengan demikian kondisi jalan menjadi salah satu syarat dalam pendistribusian barang ke suatu wilayah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembentukan harga barang/jasa konstruksi tersebut. Data pada akhir tahun 2019 menunjukkan panjang jalan nasional di Bali tercatat sepanjang 629,39 km dan jalan provinsi sepanjang 743,34 km. Selengkapnya tentang panjang jalan menurut Kabupaten/Kota disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Status di Bali, Keadaan Akhir Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Jalan Nasional (km)	Jalan Provinsi (km)	Jalan Kabupaten (km)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Jembrana	72,62	29,48	1 075,93	13,73
2. Tabanan	65,88	136,72	863,22	12,42
3. Badung	63,47	61,18	663,41	9,18
4. Gianyar	64,33	85,52	515,24	7,75
5. Klungkung	37,71	9,34	453,80	5,84
6. Bangli	21,19	125,14	949,74	12,77
7. Karangasem	97,97	145,98	1 202,54	16,85
8. Buleleng	156,33	106,65	999,95	14,71
9. Denpasar	49,89	43,33	486,09	6,75
10. Total	629,39	743,34	7 209,92	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali

Dilihat dari kondisi permukaannya sesuai dengan tabel 3.2, jalan dengan kondisi baik tercatat sepanjang 764,68 km (55,71%), yang tergolong kondisi sedang tercatat sepanjang 469,08 km (34,17%), kondisi rusak tercatat sepanjang 136,07 km (9,91%), dan kondisi rusak berat tercatat sepanjang 2,90 km (0,21%).

Tabel 3.2. Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Jalan di Bali, Keadaan Akhir Tahun 2019 (km)

Status Jalan	Kondisi				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Jalan Nasional	362,72	249,77	14,00	2,90	629,39
2. Jalan Provinsi	401,96	219,31	122,07	0	743,34
Total	764,68	469,08	136,07	2,90	1 372,73

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali

Selain kondisi jalan, pembentukan harga barang/jasa konstruksi juga diduga dipengaruhi oleh jarak kabupaten/kota sebagai produsen/sumber barang/jasa menuju setiap lokasi pembangunan konstruksi di Bali. Jarak antar kabupaten/kota terjauh di Provinsi Bali adalah dari Kabupaten Karangasem menuju Kabupaten Jembrana yaitu sejauh 173 km (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali tahun 2019).

Moda transportasi laut juga menjadi sarana pendukung transportasi Provinsi Bali dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Akses barang masuk dari luar Provinsi Bali melalui empat pelabuhan utama yaitu Benoa, Padangbai, Celukan Bawang, dan Gilimanuk. Dari keempat pelabuhan tersebut, muat barang terbanyak tercatat di Pelabuhan Padang Bai sebanyak 139,73 ton sedangkan bongkar barang paling banyak tercatat di Pelabuhan Tanjung Benoa sebanyak 1448,72 ton (hasil Simoppel tahun 2019).

3.2 Dana Alokasi Umum Provinsi Bali

Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) bagi tiap daerah diduga memiliki peran penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya, tergantung komponen pembentuknya. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, serta dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan

DAU tahun sebelumnya. Besaran DAU per Kabupaten/Kota se-
Provinsi Bali tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)
di Provinsi Bali, 2019**

Kabupaten/Kota	Alokasi (Dalam Ribuan Rupian)
(1)	(2)
1. Kabupaten Jembrana	574 864 803
2. Kabupaten Tabanan	835 897 238
3. Kabupaten Badung	361 230 411
4. Kabupaten Gianyar	716 521 199
5. Kabupaten Klungkung	554 206 328
6. Kabupaten Bangli	584 470 785
7. Kabupaten Karangasem	771 789 284
8. Kabupaten Buleleng	998 167 419
9. Kota Denpasar	677 033 111
Total Provinsi Bali	6 074 180 578

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id>

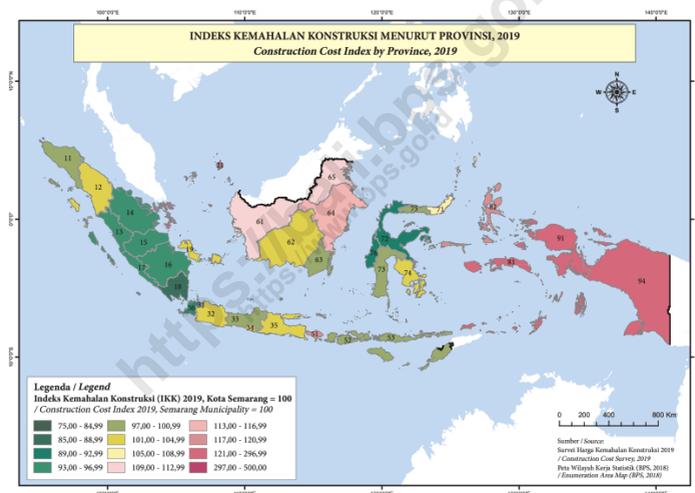
Kabupaten yang tercatat memperoleh DAU paling besar di Provinsi Bali adalah Kabupaten Buleleng dengan DAU sebesar 998,2 miliar rupiah kemudian disusul Kabupaten Tabanan sebesar 835,9 miliar rupiah. Sedangkan kabupaten yang tercatat memperoleh DAU paling rendah adalah Kabupaten Badung dengan DAU sebesar 361,2 miliar rupiah.

3.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali

IKK merupakan indeks spasial yang digunakan untuk membandingkan tingkat harga/kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di suatu daerah dibandingkan kota acuan. Semakin besar IKK menunjukkan semakin mahal harga bahan bangunan/konstruksi

di wilayah tersebut dibandingkan dengan kota acuan. Harga bahan bangunan atau konstruksi dan harga sewa alat berat di suatu daerah diduga dipengaruhi oleh letak geografis dan kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan bahan bangunan secara mandiri. Selengkapnya tentang IKK Provinsi se-Indonesia disajikan pada gambar 3.3

Gambar 3.3. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2019



Pada tahun 2019, nilai IKK Provinsi Bali tercatat sebesar 119,10. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga barang/jasa konstruksi di wilayah Provinsi Bali 19,10 persen lebih mahal dibandingkan dengan kota acuan (Kota Semarang). Jika dilihat dari besaran IKK-nya, rata-rata IKK di Provinsi Bali relatif lebih tinggi dibanding nilai IKK provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa. Hal ini diduga karena sebagian barang konstruksi

didatangkan dari pulau Jawa terutama barang hasil industri. Sebagian barang lainnya seperti batu bata, batako, dan barang-barang natura (pasir, kerikil, dan lainnya) dihasilkan di Provinsi Bali. Namun dikarenakan adanya penutupan sejumlah usaha galian C di Kabupaten Karangasem (Perda Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012), jumlah produksi barang-barang natural itu pun semakin sedikit sehingga mendorong relatif mahalnnya harga barang-barang natural tersebut.

Pada tahun 2019, IKK tertinggi tercatat di Provinsi Papua sebesar 218,59 sedangkan IKK terendah tercatat di Provinsi Lampung sebesar 88,84. Jika diurutkan dari nilai IKK tertinggi, Provinsi Bali menduduki urutan ke-6 dari 34 Provinsi di Indonesia. Sementara, jika dilihat menurut kawasannya, IKK Provinsi Bali menempati urutan pertama dibandingkan 9 provinsi yang ada di kawasan wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra).

Gambar 3.4. Nilai dan Ranking Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali, 2015-2019



**) Kota Acuan Surabaya

***) Kota Acuan Semarang

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besaran nilai dan ranking IKK Provinsi Bali tahun 2019 terhitung lebih rendah. Hal ini mengisyaratkan perubahan harga barang/jasa konstruksi di Provinsi Bali relatif lebih cepat dibandingkan besaran perubahan harga di kota acuan (Kota Semarang). Karena merupakan indeks spasial, kenaikan atau penurunan nilai IKK tidak serta merta menunjukkan kenaikan/penurunan harga barang/jasa konstruksi di wilayah tersebut. Kenaikan IKK antar tahun hanya menunjukkan kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di suatu wilayah lebih tinggi dibandingkan kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di kota acuan (Kota Semarang).

3.4 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota

IKK yang dihitung di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kabupaten/kota yang tercatat memiliki nilai IKK paling tinggi yaitu Kabupaten Puncak dengan IKK sebesar 493,31 kemudian disusul Kabupaten Puncak Jaya sebesar 459,89 serta Kabupaten Intan Jaya sebesar 439,11. Ketiga kabupaten tersebut terletak di Provinsi Papua. Nilai IKK terendah tercatat tiga kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pesawaran sebesar 80,49 kemudian disusul Kabupaten Lampung Timur sebesar 81,49; serta Kota Metro sebesar 82,22.

Provinsi Bali yang terdiri dari 9 Kabupaten/Kota, IKK tertinggi pada tahun 2019 tercatat di Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 126,59 kemudian disusul Kabupaten Badung sebesar

126,12 dan Kabupaten Tabanan sebesar 122,39. Sementara itu, IKK terendah tercatat di Kabupaten Klungkung sebesar 110,16. Selengkapnya tentang IKK dirinci menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali disajikan pada tabel 3.4.

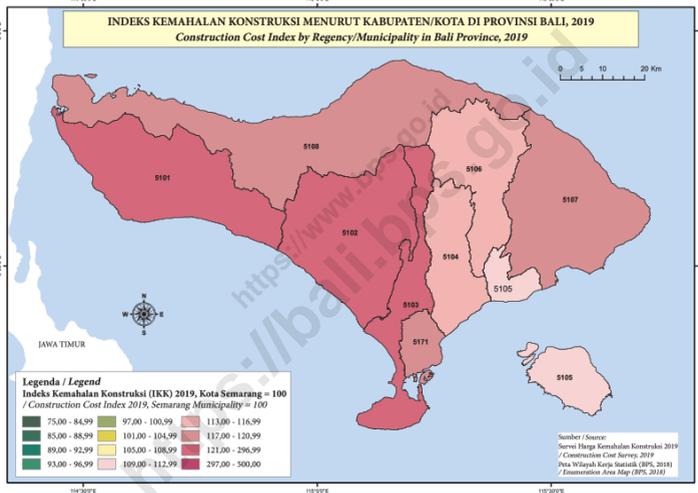
Tabel 3.4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2019

Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)
1. Kabupaten Jembrana	126,59
2. Kabupaten Tabanan	122,39
3. Kabupaten Badung	126,12
4. Kabupaten Gianyar	114,65
5. Kabupaten Klungkung	110,16
6. Kabupaten Bangli	116,52
7. Kabupaten Karangasem	118,29
8. Kabupaten Buleleng	119,88
9. Kota Denpasar	118,25
Provinsi Bali	119,10

Nilai IKK Kabupaten Jembrana sebesar 126,59 menunjukkan tingkat kemahalan barang/jasa konstruksi di Kabupaten Jembrana 26,59 persen lebih mahal dari kota acuan (Kota Semarang). Dengan kata lain, jika untuk membangun sebuah gedung di Kota Semarang dibutuhkan biaya 100 milyar rupiah, maka gedung yang sama dibangun di Kabupaten Jembrana akan memerlukan biaya sebesar 126,59 milyar rupiah. Kondisi topografi yang relatif berbukit serta jarak yang cukup jauh dengan ibukota provinsi diduga memberi sumbangan terhadap mahalanya harga barang/jasa konstruksi di Kabupaten Jembrana.

Sementara itu, nilai IKK Kabupaten Klungkung yang paling rendah di Provinsi Bali diduga karena berbagai bahan natural konstruksi tersedia di Kabupaten Klungkung sebagai salah satu dampak dari erupsi Gunung Agung.

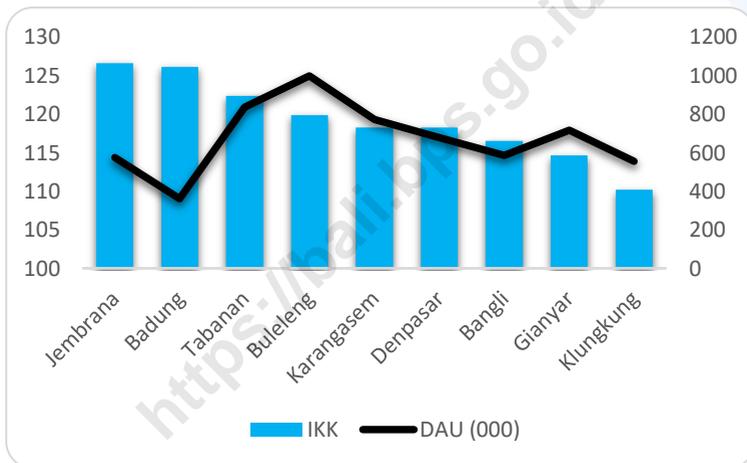
Gambar 3.5. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2019



Seperti disampaikan pada bagian sebelumnya, IKK merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam penghitungan DAU, sehingga perolehan DAU masing-masing kabupaten/kota di Bali akan sejalan dengan nilai IKK-nya, kecuali ada kondisi khusus. Alokasi DAU paling besar tercatat di Kabupaten Buleleng yaitu sebesar 998,167 milyar rupiah. Hal ini sejalan dengan besaran nilai IKK Kabupaten Buleleng yang relatif tinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya juga hasil perhitungan nilai variabel penyusun DAU lainnya. Kabupaten Badung dengan nilai IKK

sebesar 126,12 atau peringkat ke-2 dari 9 kabupaten/kota di Bali tercatat memperoleh DAU paling kecil yaitu 361,230 milyar rupiah. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung yang cukup besar sehingga memiliki indeks kemandirian fiskal.

Gambar 3.6. Indeks Kemahalan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2019





LAMPIRAN

**Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2015
(Kota Surabaya = 100)**

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	97,74
2	1200	Sumatera Utara	102,54
3	1300	Sumatera Barat	103,01
4	1400	Riau	104,97
5	1500	Jambi	96,64
6	1600	Sumatera Selatan	105,12
7	1700	Bengkulu	101,64
8	1800	Lampung	97,57
9	1900	Bangka Belitung	104,90
10	2100	Kepulauan Riau	122,33
11	3100	DKI Jakarta	110,13
12	3200	Jawa Barat	101,09
13	3300	Jawa Tengah	95,99
14	3400	DI Yogyakarta	99,06
15	3500	Jawa Timur	100,00
16	3600	Banten	101,82
17	5100	Bali	110,10
18	5200	Nusa Tenggara Barat	91,80
19	5300	Nusa Tenggara Timur	97,59
20	6100	Kalimantan Barat	118,87
21	6200	Kalimantan Tengah	110,99
22	6300	Kalimantan Selatan	102,92
23	6400	Kalimantan Timur	119,06
24	6500	Kalimantan Utara	129,56
25	7100	Sulawesi Utara	110,61
26	7200	Sulawesi Tengah	92,49
27	7300	Sulawesi Selatan	96,38
28	7400	Sulawesi Tenggara	105,85
29	7500	Gorontalo	103,05
30	7600	Sulawesi Barat	98,46
31	8100	Maluku	119,45
32	8200	Maluku Utara	125,78
33	9100	Papua Barat	146,01
34	9400	Papua	247,91

**Tabel 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2016
(Kota Surabaya = 100)**

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	100,14
2	1200	Sumatera Utara	102,76
3	1300	Sumatera Barat	103,69
4	1400	Riau	103,49
5	1500	Jambi	97,99
6	1600	Sumatera Selatan	106,15
7	1700	Bengkulu	101,86
8	1800	Lampung	99,40
9	1900	Bangka Belitung	107,64
10	2100	Kepulauan Riau	125,89
11	3100	DKI Jakarta	112,48
12	3200	Jawa Barat	103,79
13	3300	Jawa Tengah	98,96
14	3400	DI Yogyakarta	100,65
15	3500	Jawa Timur	101,78
16	3600	Banten	103,66
17	5100	Bali	113,32
18	5200	Nusa Tenggara Barat	93,70
19	5300	Nusa Tenggara Timur	99,82
20	6100	Kalimantan Barat	117,91
21	6200	Kalimantan Tengah	106,95
22	6300	Kalimantan Selatan	103,55
23	6400	Kalimantan Timur	117,60
24	6500	Kalimantan Utara	127,99
25	7100	Sulawesi Utara	111,62
26	7200	Sulawesi Tengah	95,63
27	7300	Sulawesi Selatan	99,11
28	7400	Sulawesi Tenggara	107,98
29	7500	Gorontalo	101,69
30	7600	Sulawesi Barat	98,39
31	8100	Maluku	121,76
32	8200	Maluku Utara	127,99
33	9100	Papua Barat	146,46
34	9400	Papua	239,98

**Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2017
(Kota Surabaya = 100)**

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	96,41
2	1200	Sumatera Utara	101,49
3	1300	Sumatera Barat	95,33
4	1400	Riau	94,73
5	1500	Jambi	88,39
6	1600	Sumatera Selatan	98,64
7	1700	Bengkulu	93,27
8	1800	Lampung	90,09
9	1900	Bangka Belitung	101,71
10	2100	Kepulauan Riau	122,72
11	3100	DKI Jakarta	117,57
12	3200	Jawa Barat	96,78
13	3300	Jawa Tengah	93,05
14	3400	DI Yogyakarta	92,52
15	3500	Jawa Timur	97,50
16	3600	Banten	97,88
17	5100	Bali	111,64
18	5200	Nusa Tenggara Barat	91,63
19	5300	Nusa Tenggara Timur	95,94
20	6100	Kalimantan Barat	109,12
21	6200	Kalimantan Tengah	97,47
22	6300	Kalimantan Selatan	101,67
23	6400	Kalimantan Timur	109,21
24	6500	Kalimantan Utara	118,27
25	7100	Sulawesi Utara	112,05
26	7200	Sulawesi Tengah	88,13
27	7300	Sulawesi Selatan	95,57
28	7400	Sulawesi Tenggara	99,75
29	7500	Gorontalo	92,76
30	7600	Sulawesi Barat	88,61
31	8100	Maluku	121,06
32	8200	Maluku Utara	120,92
33	9100	Papua Barat	140,04
34	9400	Papua	229,82

**Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2018
(Kota Semarang = 100)**

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	100,39
2	1200	Sumatera Utara	101,47
3	1300	Sumatera Barat	99,10
4	1400	Riau	96,86
5	1500	Jambi	92,53
6	1600	Sumatera Selatan	97,64
7	1700	Bengkulu	96,76
8	1800	Lampung	89,31
9	1900	Bangka Belitung	99,29
10	2100	Kepulauan Riau	127,70
11	3100	DKI Jakarta	109,14
12	3200	Jawa Barat	103,63
13	3300	Jawa Tengah	98,64
14	3400	DI Yogyakarta	104,88
15	3500	Jawa Timur	103,86
16	3600	Banten	100,22
17	5100	Bali	122,95
18	5200	Nusa Tenggara Barat	100,76
19	5300	Nusa Tenggara Timur	99,79
20	6100	Kalimantan Barat	113,95
21	6200	Kalimantan Tengah	102,31
22	6300	Kalimantan Selatan	105,09
23	6400	Kalimantan Timur	114,31
24	6500	Kalimantan Utara	113,25
25	7100	Sulawesi Utara	110,83
26	7200	Sulawesi Tengah	97,04
27	7300	Sulawesi Selatan	101,69
28	7400	Sulawesi Tenggara	101,96
29	7500	Gorontalo	96,46
30	7600	Sulawesi Barat	91,33
31	8100	Maluku	126,39
32	8200	Maluku Utara	116,55
33	9100	Papua Barat	134,02
34	9400	Papua	227,90

**Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2019
(Kota Semarang = 100)**

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	98,68
2	1200	Sumatera Utara	102,79
3	1300	Sumatera Barat	93,72
4	1400	Riau	94,92
5	1500	Jambi	94,38
6	1600	Sumatera Selatan	94,50
7	1700	Bengkulu	94,74
8	1800	Lampung	88,84
9	1900	Bangka Belitung	101,27
10	2100	Kepulauan Riau	128,34
11	3100	DKI Jakarta	114,06
12	3200	Jawa Barat	103,03
13	3300	Jawa Tengah	99,93
14	3400	DI Yogyakarta	103,42
15	3500	Jawa Timur	103,68
16	3600	Banten	95,84
17	5100	Bali	119,10
18	5200	Nusa Tenggara Barat	98,76
19	5300	Nusa Tenggara Timur	99,03
20	6100	Kalimantan Barat	111,53
21	6200	Kalimantan Tengah	101,90
22	6300	Kalimantan Selatan	100,90
23	6400	Kalimantan Timur	114,37
24	6500	Kalimantan Utara	112,11
25	7100	Sulawesi Utara	108,32
26	7200	Sulawesi Tengah	91,98
27	7300	Sulawesi Selatan	97,34
28	7400	Sulawesi Tenggara	101,45
29	7500	Gorontalo	97,45
30	7600	Sulawesi Barat	92,27
31	8100	Maluku	123,02
32	8200	Maluku Utara	119,11
33	9100	Papua Barat	132,67
34	9400	Papua	218,59

Tabel 6. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2015
Provinsi Bali (Kota Surabaya = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5101	Jembrana	107,02
2	5102	Tabanan	105,69
3	5103	Badung	106,08
4	5104	Gianyar	98,73
5	5105	Klungkung	99,65
6	5106	Bangli	102,84
7	5107	Karangasem	104,63
8	5108	Buleleng	106,99
9	5171	Denpasar	103,59

**Tabel 7. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2016
Provinsi Bali (Kota Surabaya = 100)**

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5101	Jembrana	113,47
2	5102	Tabanan	111,79
3	5103	Badung	111,09
4	5104	Gianyar	105,32
5	5105	Klungkung	106,30
6	5106	Bangli	110,07
7	5107	Karangasem	109,98
8	5108	Buleleng	113,74
9	5171	Denpasar	110,11

**Tabel 8. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2017
Provinsi Bali (Kota Surabaya = 100)**

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5101	Jembrana	112,93
2	5102	Tabanan	116,36
3	5103	Badung	114,54
4	5104	Gianyar	112,40
5	5105	Klungkung	101,40
6	5106	Bangli	111,63
7	5107	Karangasem	106,66
8	5108	Buleleng	118,47
9	5171	Denpasar	111,37

**Tabel 9. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2018
Provinsi Bali (Kota Semarang = 100)**

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5101	Jembrana	124,74
2	5102	Tabanan	126,12
3	5103	Badung	126,35
4	5104	Gianyar	120,51
5	5105	Klungkung	112,33
6	5106	Bangli	121,72
7	5107	Karangasem	121,49
8	5108	Buleleng	129,70
9	5171	Denpasar	124,46

**Tabel 10. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2019
Provinsi Bali (Kota Semarang = 100)**

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5101	Jembrana	126,59
2	5102	Tabanan	122,39
3	5103	Badung	126,12
4	5104	Gianyar	114,65
5	5105	Klungkung	110,16
6	5106	Bangli	116,52
7	5107	Karangasem	118,29
8	5108	Buleleng	119,88
9	5171	Denpasar	118,25



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://bali.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

Jl. Raya Puputan No.1 Renon Denpasar 80226

Telp. (0361) 238159, Fax. (0361) 238162

Email : bps5100@bps.go.id

Homepage : <http://bali.bps.go.id>

